

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 STUDI  
TENTANG PROSES PENCAIRAN DANA LANGSUNG  
DI PEMKO MEDAN**

**TESIS**

OLEH

**LONA AMELIA  
NPM. 121801090**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 STUDI  
TENTANG PROSES PENCAIRAN DANA LANGSUNG  
DI PEMKO MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**LONA AMELIA  
NPM. 121801090**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 Studi Tentang  
Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan

**Nama** : Lona Amelia

**NPM** : 121801090

**Menyetujui**

**Pembimbing I**





**Dr. R. Hamdani Harahap. M.Si**

**Pembimbing II**





**Dr. Warjio, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan diperlukan pencairan dana langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal oleh kas daerah melalui Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan tertib administrasi dengan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun pencairan dana langsung sering mengalami hambatan dalam prosesnya, hambatan yang sering terjadi disebabkan kelengkapan dokumen sering terlambat diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan waktu yang dimiliki dan belum sepenuhnya penulis mampu menyajikan suatu permasalahan secara keseluruhan mengenai hal-hal yang belum terungkap dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Pembimbing I yang sangat membantu kelancaran dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. R. Hamdani Harahap, MSi sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini;
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orangtuaku Alm.H.Drs Lotfy Azhari dan Hj Nuraini Ritonga, Suamiku Tri Harjo Wibisono SH.M.Hum serta anak-anakku tercinta Yasmin Aqilah, Muhammad Qaisar, Muhammad Kautsar.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti perkuliahan;

Semoga ilmu, dukungan serta dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Medan, April 2014  
Penulis

**LONA AMELIA**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 STUDI TENTANG PROSES PENCAIRAN DANA LANGSUNG DI PEMKO MEDAN

Nama : Lona Amelia  
N P M : 121801090  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA  
Pembimbing II : Dr. R. Hamdani Harahap, MSI

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan diperlukan pencairan dana langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal oleh kas daerah melalui Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan tertib administrasi dengan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun pencairan dana langsung sering mengalami hambatan dalam prosesnya, hambatan yang sering terjadi disebabkan kelengkapan dokumen sering terlambat diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko Medan.

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapam makna dari Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan, serta hambatan-hambatan yang muncul didalamnya.

BPKD selaku Badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan di Pemerintahan Kota Medan sudah mengimplementasikan Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan terkait dengan sistem dan prosedur pengeluaran. Di dalam pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006, hambatan yang dihadapi dalam Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan adalah adanya beberapa aturan yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

***Keywords : Implementasi Kebijakan, Pencairan Dana Langsung***

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 12

2.1 Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 .....	12
2.2 Implementasi Kebijakan.....	46

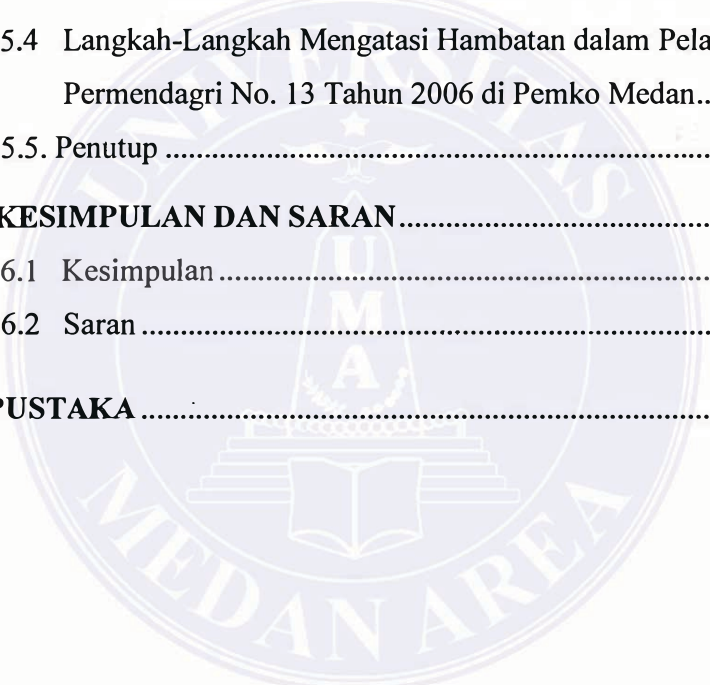
### BAB III METODE PENELITIAN ..... 54

3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Waktu Penelitian.....	54
3.3 Populasi dan Sampel .....	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5 Jenis data.....	56
3.6 Lokasi Penelitian.....	57
3.7 Analisis Data.....	57

### BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 59

4.1 Gambaran Umum Kota Medan.....	59
4.2 Gambaran Umum BPKD Kota Medan .....	65

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>85</b>
5.1 Implementasi Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 .....	86
5.2 Kasus-Kasus yang Terjadi pada Proses Pencairan Dana Langsung Di Pemko Medan .....	92
5.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemko Medan.....	99
5.4 Langkah-Langkah Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemko Medan.....	101
5.5. Penutup .....	102
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>104</b>
6.1 Kesimpulan.....	104
6.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Demayanti, 2012 : 79).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan Negara termasuk didalamnya pengelolaan keuangan Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan Undang-undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Macpal and Mandei, 2013 : 86).

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah (Kuncoro, 2004).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara terib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang komprehensif dan terpadu yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Aneta Spendzharova & Esther Versluis, 2013, Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 10.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- C.V. Som, 2011, International Journal of Public Policy Volume. 7 Nomor 1
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Delvi Demayanti, 2012, Jurnal Transformasi, Volume 14, Nomor 22.
- German Sitompul, 2012, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume IX No.3.
- Hesel, Nogi S., Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. YPAPI dan Lukman Offset, Yogyakarta.
- Indra Bastian, 2009, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Salema Empat, Jakarta.
- Omoriegie Charles Osifo, 2014 International Journal of Public Administration, Volume 37, Issue 4.
- Katherine Baicker, 2014, Journal of Economic Perspectives, Volume 28, Issue 1,.
- Kaho, Joseph, Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Mardiasmo. 2000. "Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001" Seminar Isu terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001. HIMMEP, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2001. Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mirawati, Sudjono dan Jan Hoesada. 2009. Strategi Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Majalah Akuntansi Indonesia. Edisi no. 15/tahun III/Maret 2009. Hal 56-61.
- Mulyadi. 2002. Auditing. Penerbit Salemba Empat.
- Sanford Journal Of Public Policy, Volume 1, Issue 1, Spring 2010.
- Suhrman. 2008. Kerangka Hukum Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. (online). <http://sanggar.wordpress.com/2008/03/03/kerangka-hukum-perencanaan-dan-penganggaran-daerah/> Diakses Tanggal 22 Desember 2010.
- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 1996. *Akuntansi Pemerintahan dengan sistem dana*. Edisi kedua. Yogyakarta : BPFE.
- Sugito. 2008. *Penyederhanaan Prosedur Percepat Pencairan Dana*. <http://kompas-cetak.com>. 25 Juni 2009.
- Skok & Harrisbury, 1995, Policy Issue Networks and The Public Policy Cycle, 55.4.
- Snider & Rendon, 2008, Journal of Public Procurement.
- Macpal & Mandeiij, 2013, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 9, Nomor 1.

Walters, Aydelotte, Miller, 2000, "Putting more Public in Policy Analysis", Journal Public Administration. Review, July/August/2000, 60,4.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Medan No. 68 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan.

